

Research Publication Jusuf Kalla School of Government

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Ulung Pribadi, Suranto dan Atik Septi W



Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2012

Monograph

Evaluasi Kebijakan Keuangan

Peneliti : Ulung Pribadi, Suranto dan Atik Septi W

Editor : Awang Darumurti dan Arif Zainuddin

ISBN 978-602-19921-5-9

Copyright© 2012,

Ulung Pribadi, Suranto dan Atik Septi W

48 + iv hlm; 21 cm x 29,7 cm

Cetakan I: 2012

Diterbitkan oleh

Jusuf Kalla School of Government

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon 0274-387656

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa seizin dari penerbit

ABSTRAK

Pelayanan publik di negara kita masih sering diidentikkan dengan ketidakpastian baik dalam hal biaya, waktu dan prosedur. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan seringkali mengeluhkan buruknya pelayanan para instansi organisasi-organisasi penyelenggara pelayanan. Tidak adanya standar membuat pelayanan publik menjadi penuh dengan ketidakpastian.

Untuk memperbaiki kinerja pelayanan maka pemerintah telah membuat beberapa organisasi pelayanan menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Di dalam satuan kerja BLU, apabila dikelompokkan akan terdiri dari : 1) Penyedia Barang dan Jasa; 2) Pengelola Wilayah/Kawasan 3 satker; dan 3) Pengelola Dana Khusus. Perubahan status menjadi BLU diharapkan dapat memperbaiki kinerja penyelenggara pelayanan publik, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Dalam hal ini BLU semacam diberi kebebasan untuk menyusun sendiri anggaran keuangan yang berorientasi pada kinerja dan pada output. Jadi disini ada upaya untuk mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*) karena ingin meningkatkan pelayanan publik. Mewiraswastakan pemerintah adalah paradigma yang memberi arah yang tepat pada sektor keuangan publik. Ketentuan tentang penganggaran tersebut telah ditetapkan dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 12/2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Setelah lima tahun dilaksanakannya Peraturan Pemerintah tersebut, maka ingin diketahui tingkat efektifitas dari diberlakukannya kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil telusur pustaka, media dan referensi maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Untuk aspek efektivitas, berdasarkan kebijakan tentang Pengelolaan Keuangan BLU maka tingkat capaian efektivitas kebijakan sudah baik dan relatif dengan tujuan dibentuknya BLU, meskipun masih ada juga beberapa BLU yang belum dapat mencapainya; 2) untuk aspek kecukupan mayoritas BLU telah dapat memecahkan persoalan terkait dengan Pengelolaan Keuangan di dalam lembaga/organisasi, meskipun baru sampai pada kriteria cukup. Artinya masih perlu peningkatan pemenuhan secara lebih mendalam tentang kebijakan yang terkait dengan PK BLU; 3) Dalam hal pemerataan, pencapaian baru sampai kriteria cukup karena dengan penerapan PK BLU ini belum seluruh BLU terkait dapat memberikan pelayanan secara merata ke seluruh komponen masyarakat yang berbeda; 4) untuk aspek responsivitas. Hasil kebijakan ini belum seluruh BLU terkait dapat merespon dengan baik oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dari BLU, meskipun tingkat responsivitasnya berbeda-beda; 5) Dalam aspek ketepatan belum semua BLU sudah dapat menerapkan BLU secara tepat karena masih ada beberapa komponen yang belum merasakan manfaat dari adanya kebijakan ini.

Kata kunci: Evaluasi kebijakan, mewiraswastakan pemerintah, Badan Layanan Umum